

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Net Zero Emissions (NZE) di Kota Semarang belum berjalan secara efektif dan masih menghadapi permasalahan struktural yang cukup mendasar.

Dari aspek komunikasi, implementasi kebijakan NZE mengalami distorsi akibat tidak adanya regulasi daerah yang secara spesifik mengatur kebijakan tersebut. Kebijakan hanya terintegrasi dalam dokumen perencanaan, sehingga menyebabkan perbedaan pemahaman antar organisasi perangkat daerah (OPD) dan tidak adanya keseragaman arah kebijakan. Komunikasi yang terjadi juga masih bersifat administratif dan belum mampu membangun koordinasi lintas sektor secara efektif.

Dari aspek sumber daya, implementasi kebijakan NZE belum didukung oleh kapasitas yang memadai. Keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang perubahan iklim, serta belum berkembangnya infrastruktur pendukung menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program penurunan emisi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan NZE belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.

Dari aspek disposisi, meskipun terdapat komitmen normatif dari pemerintah daerah, namun kebijakan NZE belum menjadi agenda strategis yang

kuat. Terdapat kecenderungan bahwa prioritas pembangunan masih lebih berfokus pada aspek ekonomi dan infrastruktur, sehingga menimbulkan potensi konflik kepentingan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan.

Dari aspek struktur birokrasi, implementasi kebijakan NZE masih dihadapkan pada kondisi fragmentasi kelembagaan. Tidak adanya regulasi khusus dan standar operasional prosedur (SOP) menyebabkan koordinasi antar instansi berjalan lemah dan bersifat sektoral. Kondisi ini menjadi bottleneck utama dalam implementasi kebijakan karena tidak adanya kejelasan pembagian kewenangan dan mekanisme kerja yang terintegrasi.

Selain itu, analisis aktor menunjukkan bahwa hubungan antar aktor dalam implementasi kebijakan NZE belum terbangun secara kolaboratif. Bappeda berperan sebagai koordinator tanpa kewenangan eksekusi, sementara OPD teknis menjalankan program secara parsial tanpa integrasi yang kuat. Di sisi lain, peran masyarakat masih terbatas dan belum menjadi bagian strategis dalam implementasi kebijakan.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan NZE di Kota Semarang masih bersifat sektoral, belum terintegrasi, dan belum didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan NZE masih berada pada tahap awal implementasi dan belum mampu mendorong perubahan yang signifikan dalam arah pembangunan rendah karbon di tingkat daerah.

## 4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang bersifat strategis dan operasional untuk memperkuat implementasi kebijakan Net Zero Emissions (NZE) di Kota Semarang.

Pertama, pemerintah daerah perlu menyusun regulasi khusus di tingkat daerah yang secara eksplisit mengatur kebijakan NZE. Regulasi ini penting untuk memberikan kejelasan arah kebijakan, menetapkan target penurunan emisi yang terukur, serta mempertegas pembagian kewenangan antar OPD. Tanpa adanya regulasi yang spesifik, implementasi kebijakan akan terus bersifat parsial dan tidak terkoordinasi.

Kedua, perlu dilakukan penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor melalui pembentukan forum atau tim koordinasi khusus yang menangani implementasi NZE. Forum ini harus memiliki kewenangan yang jelas dan melibatkan seluruh OPD terkait, sehingga mampu mengurangi fragmentasi birokrasi dan meningkatkan integrasi kebijakan.

Ketiga, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui alokasi anggaran yang lebih terfokus pada program penurunan emisi, serta peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan penguatan kapasitas di bidang perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon.

Keempat, perlu adanya integrasi yang lebih kuat antara kebijakan NZE dengan agenda pembangunan daerah. Kebijakan penurunan emisi harus diposisikan sebagai bagian dari strategi pembangunan, bukan sebagai program tambahan. Dengan demikian, potensi konflik antara pembangunan ekonomi dan kebijakan lingkungan dapat diminimalisir.

Kelima, pemerintah daerah perlu mendorong keterlibatan aktor non-pemerintah, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan akademisi, dalam implementasi kebijakan NZE. Partisipasi ini penting untuk memperkuat pendekatan kolaboratif serta meningkatkan efektivitas kebijakan dalam jangka panjang.

Dengan dilakukannya langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi kebijakan Net Zero Emissions di Kota Semarang dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan mampu mendukung pencapaian target penurunan emisi secara berkelanjutan.